



P E M E R I N T A H K O T A T A N G E R A N G
I N F O R M A S I / R I N G K A S A N L A P O R A N P E N Y E L E N G G A R A A N
P E M E R I N T A H A N D A E R A H K O T A T A N G E R A N G
A K H I R M A S A J A B A T A N W A L I K O T A P E R I O D E
T A H U N 2 0 1 3 - 2 0 1 8

1. P E N D A H U L U A N

Informasi / Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Akhir Masa Jabatan Walikota Periode Tahun 2013-2018 (ILPPD AMJ) disusun oleh Pemerintah Kota Tangerang merupakan informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintah daerah selama lima tahun yang dipublikasikan melalui media cetak dan/atau media elektronik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007.

Penyampaian ILPPD AMJ ini merupakan cerminan akumulasi pencapaian kinerja sejak Tahun 2014 - 2018, namun demikian dalam penyusunan laporan ini capaian kinerja Tahun Anggaran 2018 belum dapat diukur sepenuhnya yaitu baru sampai dengan Triwulan I, karena kegiatan masih berlangsung dan lebih lanjut akan di jelaskan pada ILPPD Tahun Anggaran 2018 mendatang.

a. G a m b a r a n U m u m D a e r a h

Kota Tangerang terbentuk pada tanggal 28 Februari 1993 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Terletak pada koordinat 106⁰36'–106⁰42' Bujur Timur (BT) dan 6⁰6'–6⁰13' Lintang Selatan (LS). Kota Tangerang memiliki luas ±164.55 km² atau sekitar 1.59% dari luas Propinsi Banten (termasuk Bandara Soekarno–Hatta seluas ±19.69 km²). Secara

administratif Kota Tangerang terdiri dari 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan dengan 990 Rukun Warga (RW) dan 5.000 Rukun Tetangga (RT), yang berbatasan langsung dengan Kec. Teluknaga, Kec. Kosambi dan Kec. Sepatan (Kab. Tangerang) di sebelah utara, Kec. Curug (Kab. Tangerang) serta Kec. Serpong Utara dan Kec. Pondok Aren (Kota Tangsel) di sebelah selatan, Jakarta Barat dan Jakarta selatan (DKI Jakarta) di sebelah Timur, Kec. Pasar Kemis dan Kec. Cikupa (Kab. Tangerang) di sebelah Barat.

b. Kondisi Demografis

Laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu tahun 2014-2017 mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh adanya data penduduk ganda (duplicate) dan pemutakhiran NIK dari KTP manual menjadi KTP-el. Kota Tangerang sebagai wilayah *hinterland* pertumbuhan penduduknya tidak hanya dipengaruhi oleh kelahiran (fertilitas) tetapi juga oleh perpindahan (migrasi).

Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah (jiwa)				LPP 2016-2017
		2014	2015	2016	2017	%
1	Ciledug	173.265	131.375	119.313	125.624	5,29
2	Larangan	184.977	147.419	133.264	137.080	2,86
3	Karang Tengah	131.591	111.790	97.961	102.459	4,59
4	Cipondoh	262.350	201.696	179.511	188.961	5,26
5	Pinang	185.785	165.425	151.207	156.654	3,60
6	Tangerang	168.844	164.646	136.074	143.751	5,64
7	Karawaci	177.907	181.823	169.354	173.501	2,45
8	Jatiuwung	121.420	102.067	96.723	100.172	3,57
9	Cibodas	150.320	159.732	135.742	141.681	4,38
10	Periuk	140.503	135.438	122.620	127.557	4,03
11	Batuceper	97.634	91.856	84.860	86.777	2,26
12	Neglasari	111.930	115.707	104.036	107.890	3,70
13	Benda	93.368	77.520	72.101	75.554	4,79
	Kota Tangerang	1.999.894	1.786.494	1.602.766	1.667.661	4,05

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang 2017 (Data Per Desember 2017)

Kepadatan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Cibodas sebesar 14.743 jiwa/km², sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Neglasari yaitu sebesar 6.710 jiwa/km² dibawah kepadatan penduduk Kota Tangerang yang rata-rata sebesar 10.135 jiwa/km².

2. INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN

Perkembangan indikator makro pembangunan daerah Kota Tangerang selama kurun waktu tahun 2014-2018 dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perkembangan pembangunan manusia di Kota Tangerang terus mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka IPM secara konsisten selama periode 2014-2017. Pengembangan program-program seperti program layanan kesehatan, partisipasi sekolah, perbaikan sanitasi lingkungan dapat mendorong peningkatan derajat kesehatan dan pengetahuan. Pelaksanaan program-program tersebut secara langsung berdampak terhadap angka IPM Kota Tangerang. Sampai dengan akhir tahun 2017, IPM Kota Tangerang adalah sebesar 77,01%, dengan nilai indikator derajat kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 71,38 tahun, indikator pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masing-masing sebesar 13,44 tahun dan 10,29 tahun. Perkiraan sampai dengan akhir tahun 2018, IPM akan mencapai sebesar 77,36.

Komponen IPM Kota Tangerang Tahun 2014 – 2017

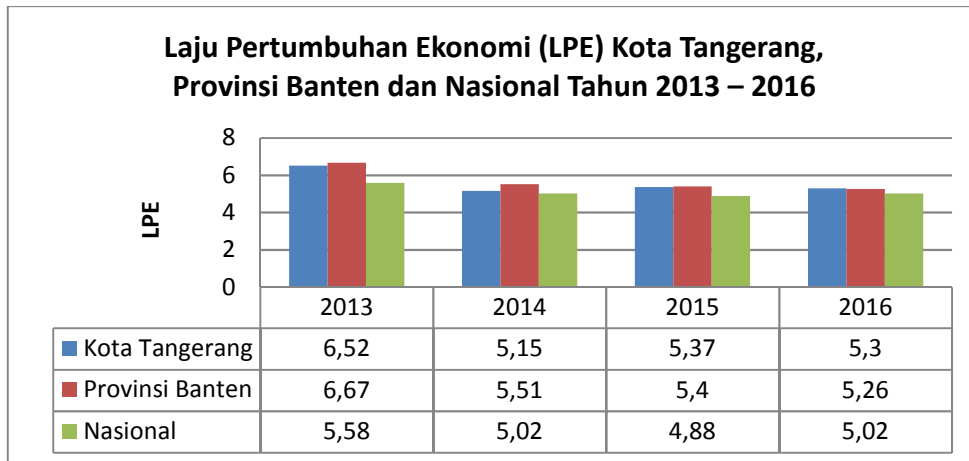
Komponen IPM Kota Tangerang	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup (Tahun)	71,09	71,29	71,34	71,38
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,86	12,90	13,41	13,44
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	10,20	10,20	10,28	10,29
Pengeluaran (Ribuan Rupiah)	13.671,00	13.766,00	13.911,00	14.104,00
Indeks Harapan Hidup	78,60	78,61	78,98	79,05
Indeks Pengetahuan	69,72	69,83	71,52	71,63
Indeks Pengeluaran	79,69	79,90	80,22	80,64
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,87	76,08	76,81	77,01

Sumber: BPS Kota Tangerang, 2018

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Kinerja pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dari besarnya PDRB di Kota Tangerang dan peningkatan PDRB Kota Tangerang didorong oleh beberapa sektor ekonomi yang didominasi oleh lapangan usaha sektor industri pengolahan.

Pada tahun 2016 perekonomian Kota Tangerang mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini terlihat dari laju pertumbuhan PDRB Kota Tangerang tahun 2016 sebesar 5,30 persen, sedangkan tahun 2014 dan 2015 sebesar 5,15 persen dan 5,37 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 12,36 persen. Seluruh lapangan usaha ekonomi PDRB yang lain pada tahun 2016 mencatat pertumbuhan yang positif.

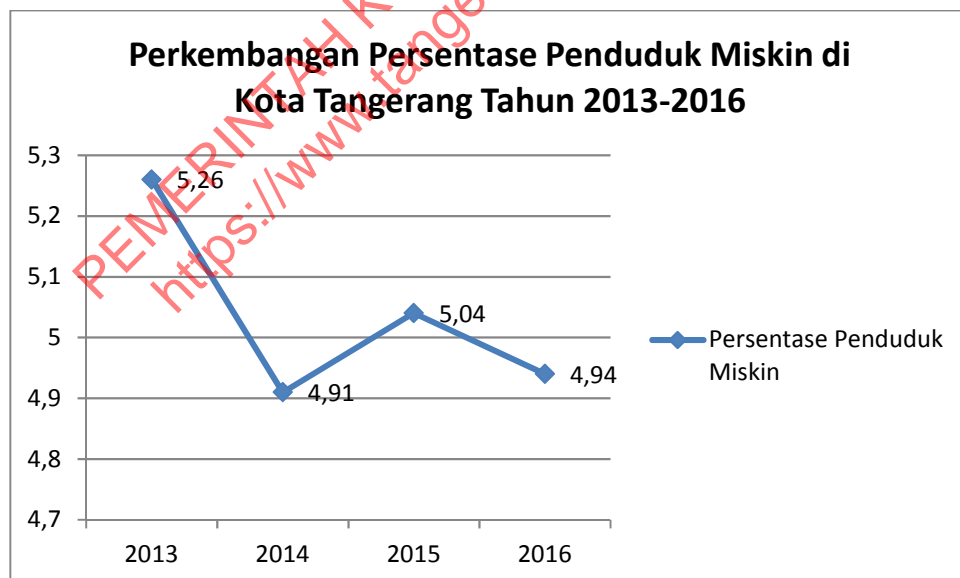


Sumber: BPS Kota Tangerang, Banten dan Pusat

Namun demikian, sampai dengan akhir tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dan nasional.

c. Tingkat Kemiskinan

Perkembangan jumlah dan persentase Penduduk miskin Kota Tangerang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, dimana terjadi penurunan penduduk miskin sampai tahun 2014 dan mengalami kenaikan di tahun 2015, selanjutnya kembali turun di tahun 2016.

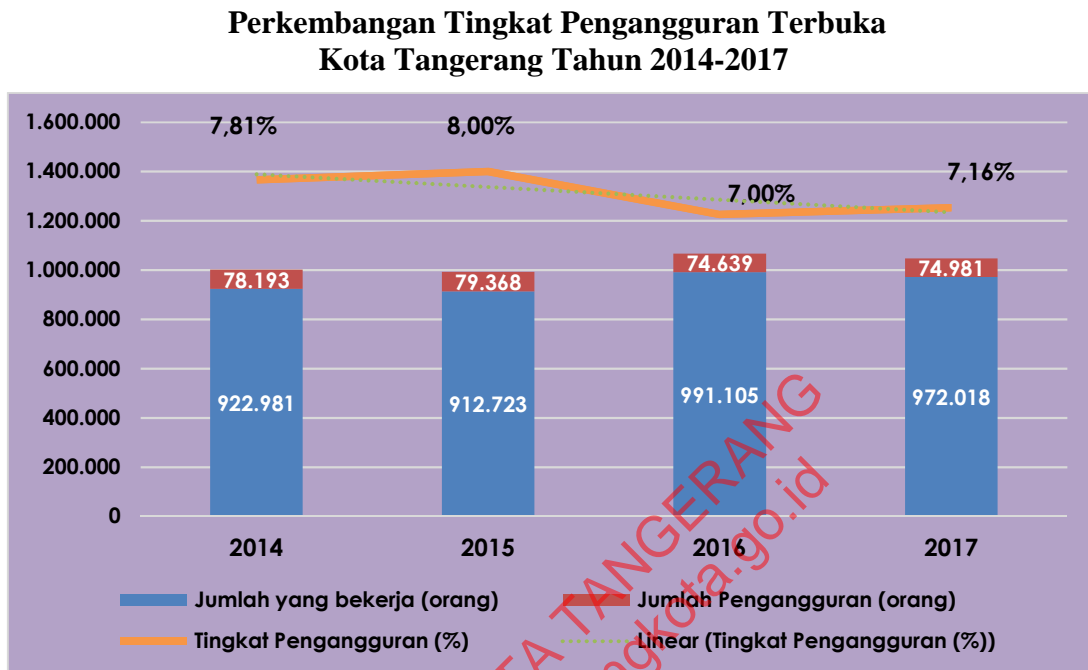


Sumber: BPS Kota Tangerang

Program kesehatan gratis, pendidikan melalui Program Tangerang Cerdas , infrastruktur dan subsidi pangan merupakan program tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan bagi warga Kota Tangerang.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tangerang pada kurun waktu empat tahun (2014-2017) berada pada kisaran 7 s.d 8 persen.



Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2017

e. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan refleksi dari sikap masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Nilai IKM Kota Tangerang selama tahun 2016-2017 mendapat kategori A (Sangat Baik) meningkat dari kategori B pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Tangerang telah menyelenggarakan pelayanan publik dengan sangat baik.

3. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

a. Visi Dan Misi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018, telah ditetapkan visi pembangunan jangka menengah untuk 5 tahun, yaitu **“Terwujudnya Kota Tangerang yang maju, mandiri, dinamis, dan sejahtera, dengan masyarakat yang berakhlakul karimah”**.

Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka disusunlah misi daerah sebagai rumusan umum tindakan konkret yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik. akuntabel. dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas. kompeten. dan profesional
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi
3. Mengembangkan kualitas pendidikan. kesehatan. dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi
4. Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas
5. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih. sehat. dan nyaman

b. Prioritas Daerah

Berdasarkan hasil pemaduserasian (sinkronisasi) Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Banten, maka Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tangerang yang dihasilkan sebanyak 10 (sepuluh) prioritas yaitu:

1. Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih;
2. Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau;
3. Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau;
4. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
5. Ketahanan Pangan Daerah;
6. Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai;
7. Kondisivitas Iklim Investasi dan Iklim Usaha Daerah;
8. Daya Dukung Lingkungan dan Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingkungan);
9. Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat;
10. Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masyarakat; dan

4 . K E U A N G A N D A E R A H

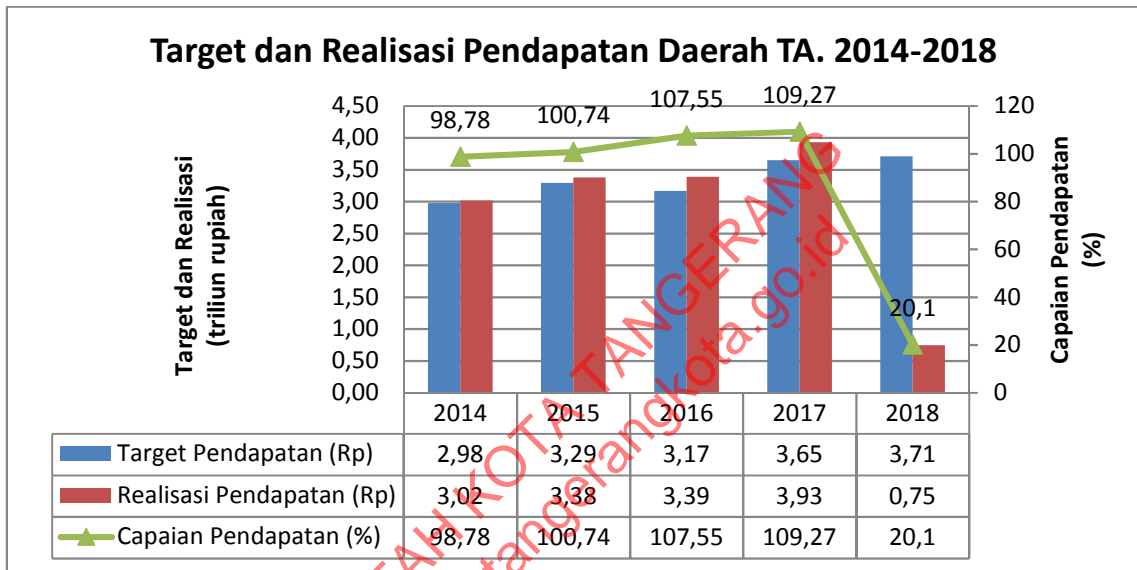
a. Pendapatan Daerah

Target dan realisasi pendapatan daerah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut :

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2014-2018

No	Tahun Anggaran	Target Pendapatan (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Capaian Pendapatan (%)	Rata-rata Capaian s/d 2017 (%)
1	2014	2.977.599.316.157,00	3.016.402.369.860,00	98,78	104,09
2	2015	3.294.192.110.809,00	3.379.639.309.942,00	100,74	
3	2016	3.168.609.881.640,00	3.388.855.221.210,00	107,55	
4	2017	3.647.470.734.253,00	3.930.164.161.844,00	109,27	
5	2018	3.708.387.835.169,00	745.477.329.316,00	20,10	
	Jumlah	16.796.259.878.028,00	14.460.538.392.172,00	86,09	

Sumber : BPKD Kota Tangerang, 2018 (Sampai dengan triwulan I Tahun 2018)



Sumber : BPKD Kota Tangerang, 2018 (Sampai dengan triwulan I Tahun 2018)

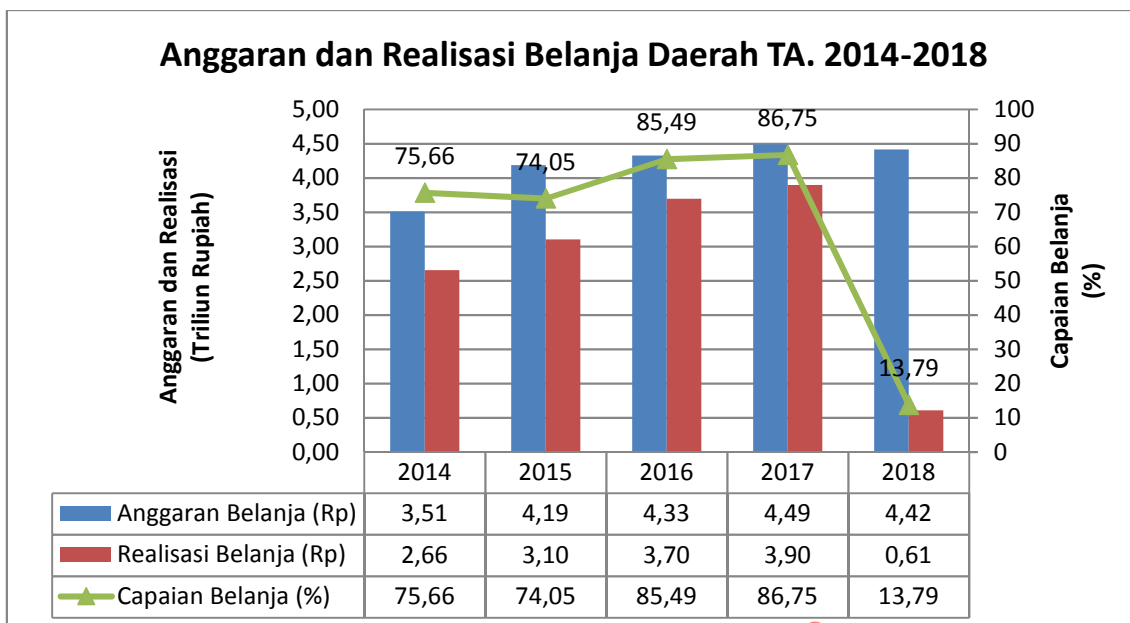
b. Belanja Daerah

Anggaran dan realisasi belanja daerah Kota Tangerang periode Tahun Anggaran 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel dan Gambar berikut :

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2014-2018

No.	Tahun Anggaran	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Capaian Belanja (%)	Rata-rata Capaian s/d 2017 (%)
1	2014	3.510.664.614.205,00	2.656.087.931.653,00	75,66	80,49
2	2015	4.187.571.847.064,00	3.101.050.547.898,00	74,05	
3	2016	4.325.578.379.939,00	3.697.723.843.685,00	85,49	
4	2017	4.491.146.524.148,69	3.896.051.044.375,78	86,75	
5	2018	4.415.108.608.107,72	609.038.444.939,00	13,79	
	Jumlah	20.930.069.973.464,40	13.959.951.812.550,80	66,70	

Sumber: BPKD Kota Tangerang, 2018 (Sampai dengan triwulan I Tahun 2018)



Sumber: BPKD Kota Tangerang, 2018 (Sampai dengan triwulan I Tahun 2018)

5. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan urusan yang menjadi prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2014-2018, dapat dipaparkan secara singkat sebagai berikut :

a. Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau



Dapat terlihat dengan capaian Indeks pendidikan sampai dengan tahun 2017 sebesar 71,51 poin dari target sebesar 70,25 poin. Program prioritas yang telah diselenggarakan Pemerintah Kota Tangerang dalam upaya memberikan pelayanan pendidikan yang lengkap, berkualitas, dan terjangkau melalui Program Tangerang Cerdas berupa pemberian bantuan biaya SPP dan biaya personal bagi 10.400 siswa miskin SD/MI dan 2.633 siswa miskin SMP/MTs, biaya operasional pendidikan bagi 400 SD/MI, 135 SD swasta, 35 SMP/MTS negeri dan 164 SMP swasta., serta pemberian bantuan operasional pendidikan non formal (Paket A,B dan C) kepada 30 PKBM dengan 3.200 siswa/warga belajar.

b. Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau

Terlihat dari pencapaian indeks kesehatan sampai dengan tahun 2017 sebesar 78,98 poin. Upaya dalam rangka Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau ditempuh melalui **Program Home Care** yaitu pemeriksaan kesehatan melalui kunjungan kerumah-rumah warga setiap hari oleh petugas di 36 Puskesmas yang tersebar di seluruh



Kecamatan. Disamping itu juga melaksanakan peningkatan pelayanan masyarakat yang berkelanjutan mulai dari bayi belum lahir (intervensi kepada ibu hamil) sampai dengan kelompok Lanjut Usia, meliputi perencanaan kehamilan pada pelayanan kesehatan ibu hamil, pola makan dan pola hidup sehat bagi seluruh kelompok usia melalui pelayanan gizi, pelayanan kesehatan penyakit tidak menular melalui program pengelolaan penyakit kronis, sosialisasi dan advokasi program 1000 hari pertama kehidupan bagi lintas sektor untuk 60 orang, pemantauan pada 527 tempat, serta pelaksanaan imunisasi UCI (*Universal Child Immunization*) pada 104 kelurahan. Pada tahun 2018 sedang dikembangkan Puskesmas Rawat Inap sebanyak 2 unit yang berlokasi di Kecamatan Periuk dan Kecamatan Cipondoh.

c. Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan Memadai;



Upaya pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang layak dan memadai dilaksanakan untuk mencapai terwujudnya pengendalian banjir dan genangan, pelayanan transportasi perkotaan terpadu serta lingkungan perumahan dan permukiman yang layak. Terwujudnya pengendalian banjir dan genangan dilakukan dengan upaya pengurangan luasan banjir dan genangan melalui normalisasi dan pengerukan lumpur dalam rangka memanfaatkan saluran pembuang dan jaringan irigasi yang ada secara optimal, pembangunan pusat-pusat pengendalian banjir melalui sistem tata air mandiri dan bangunan tampungan dan resapan air, perbaikan sistem drainase dan pengadaan pompa air, terutama pada lokasi yang rendah dan di tepi sungai, pembuatan sumur resapan serta pembuatan biopori. Melalui upaya tersebut, sampai dengan triwulan I tahun 2018 jumlah lokasi banjir yang telah tertangani sebanyak 31 titik/lokasi banjir.

Selanjutnya untuk mencapai terwujudnya pelayanan transportasi perkotaan terpadu dilakukan dengan peningkatan pemeliharaan/maintenance ataupun penggantian pada traffic light yang tidak layak kondisinya, peningkatan SDM penanganan teknis traffic light melalui pelatihan, pengadaan alat untuk mendukung kinerja para teknisi traffic light,



pelatihan terhadap pegawai ATCS untuk dijadikan tenaga teknis server ATCS, serta penambahan petugas lapangan. Disamping itu sampai dengan tahun 2018 telah dioperasikan 2 (dua) koridor angkutan umum massal yaitu koridor Terminal Poris Plawad-Jatiuwung dan koridor Terminal Poris Plawad-Perumnas. Kemacetan yang telah tertangani sebanyak 78 titik kemacetan dari 82 titik kemacetan.



Sementara dalam rangka terwujudnya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, sampai dengan tahun 2017 Pemerintah Kota Tangerang telah melaksanakan pembangunan sebanyak 4.987 rumah tidak layak huni (RTLH) dan 4.042 unit jamban sehat. Pada tahun 2018 akan diselesaikan pembangunan sebanyak 1.000 rumah tidak

layak huni (RTLH) dan 1.671 unit jamban sehat.

d. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Upaya penanggulangan kemiskinan bagi warga Kota Tangerang dilakukan melalui Program kesehatan gratis, pendidikan melalui Program Tangerang Cerdas, pembangunan infrastruktur dan subsidi pangan yang tepat sasaran.



Selanjutnya pencapaian penanganan pengangguran terlihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan target pada tahun 2014 sebesar 8,36% dan realisasi pada tahun 2017 sebesar 7,16%. Upaya yang dilakukan memperluas akses peningkatan kesempatan kerja dengan memberikan informasi lowongan pekerjaan melalui pameran kesempatan kerja yaitu Job Fair keliling di 13 kecamatan dengan melibatkan 29 perusahaan dari berbagai bidang usaha, serta memberikan keterampilan kewirausahaan dan pelatihan praktis bagi pencari kerja agar dapat meningkatkan keterampilan untuk menjadi wirausaha baru.

Untuk pelayanan kesejahteraan sosial terlihat dengan capaian penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebesar 3% melalui pengawasan dan monitoring pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dan pembinaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang meliputi ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia serta disabilitas sebanyak 52.133 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per tahun. Disamping itu juga melaksanakan kegiatan pelatihan berupa perbengkelan dan elektronik kepada 650 orang terlantar per tahun, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal, pemberian bantuan program KUBE atau kelompok sosial ekonomi lainnya sebanyak 1.515 PMKS per tahun, pemberian bantuan jaminan sosial kepada 2.017 penyandang cacat fisik, mental dan lansia per tahun. Dan penyediaan utilitas di Kota Tangerang semakin dilengkapi dengan telah difungsikannya Rumah Perlindungan Sosial untuk Lansia pada tahun 2018 yang berlokasi di Kecamatan Neglasari.



e. Ketahanan Pangan Daerah



Ketersediaan pangan merupakan hal penting untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Melalui Program Tangerang Berkebun, selain sebagai salah satu perwujudan kota layak huni, penghijauan kota, meningkatkan ekonomi masyarakat, juga turut melibatkan masyarakat dalam mengelola

berbagai macam tanaman yang dikelola bersama antara masyarakat dengan kelompok wanita tani dan petani setempat. Seperti kegiatan menanam sayuran, seperti cabai, tomat, caisin, pak coy, kangkung, bayam bahkan padi dan masih banyak jenis lainnya yang kesemuanya organik yang dapat dimanfaatkan untuk konsumsi sehari-hari maupun untuk dirupiahkan

f. Daya Dukung Lingkungan dan Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-Lingkungan)



Pencapaian prioritas pembangunan ini didukung melalui pelaksanaan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, program peningkatan dan pengendalian polusi dan program pengelolaan ruang terbuka hijau. Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengendalian dampak perubahan iklim penataan lingkungan kampung hijau dan kampung iklim yang tersebar di

13 kecamatan berupa bantuan pendampingan pengelolaan dan pemilahan sampah, alat biopori, tempat sampah, tanaman hias dan tanaman produktif. Peningkatan koordinasi dan kemitraan antar stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup bekerjasama dengan perusahaan yang ada dibantaran kali/sungai Sabi. Capaian indikator pelayanan pengangkutan sampah tahun 2014-2017 rata-rata sebesar 107,74 persen.



g. Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih



Pencapaian prioritas tata kelola dan tata kerja birokrasi pemerintahan Daerah yang baik dan bersih dilaksanakan melalui peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi, dimana Pemerintah Kota Tangerang secara berturut turut kembali memperoleh Opini WTP terhadap Laporan Keuangan dari BPK RI untuk kesebelas kalinya, dan penilaian Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari Kemenpan RB dengan Predikat B (Baik). Upaya yang dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM dalam pengelolaan keuangan daerah dan akuntabilitas kinerja melalui bimbingan teknis dan pembinaan kepada seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Kota Tangerang serta meningkatkan pengendalian internal.

Selanjutnya meningkatnya kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan pencapaian pendapatan selama tahun 2014-2017 diatas 100% yaitu dengan rata-rata sebesar 113,33%. Untuk target tahun 2018 sebesar 1,59 triliun rupiah realisasi sampai dengan triwulan I sudah mencapai 321,79 milyar rupiah atau sebesar 20,21% ,

Terwujudnya pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi melalui integrasi aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan (E-Planning), Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD dan SP3KTRA), Sistem Informasi Evaluasi dan Pelaporan (SIEVLAP), Sistem Pengawasan (E-Audit), Sistem Informasi Kepegawaian Daerah (SIKDA), Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan (SIAP), Aplikasi SKP Online, Aplikasi E-Absensi, Aplikasi E-Office, Aplikasi Layanan Aspirasi Kotak Saran Anda (LAKSA), Sistem Informasi Petugas Lapangan (SIGAP) berbasis Web,



Aplikasi Web GIS, Aplikasi Tangerang LIVE berbasis android serta dashboard LIVE berbasis web.

h. Kondisivitas Iklim Investasi dan Iklim Usaha Daerah



Pencapaian prioritas ini diwujudkan dengan peningkatan investasi dan kemudahan perijinan melalui pameran investasi, sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), pembuatan buku profil investasi daerah, dan pengadaan sarana dan prasarana promosi (leaflet, CD, banner). Disamping itu juga ketersediaan sistem informasi pelayanan perijinan daerah melalui 20 sistem perijinan online, sedangkan jumlah penanaman modal (investasi) pada tahun 2017 sebesar 13,92 triliun rupiah, dan akan ditingkatkan pelayanan dengan pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP).

i. Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat



Dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat Pemerintah Kota Tangerang bekerjasama dengan seluruh jajaran kepolisian, TNI, BIN, Kejaksaan dan masyarakat. Terwujudnya kenyamanan dan ketertiban lingkungan, kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dilakukan dalam bentuk kegiatan operasi terpadu meliputi operasi Pedagang Kaki Lima dan Bangunan Liar, Operasi Minuman Keras, Operasi Pelacuran/PSK, Operasi Gepeng dan Anjal, pengawasan tempat hiburan dan bangunan.

j. Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya Saing Masyarakat



Pencapaian prioritas ini salah satunya melalui peningkatan kepariwisataan dimana sampai dengan tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan mencapai 1.108.328 orang, dan tahun 2018 ditargetkan sebanyak 363.642 orang. Adapun upaya yang dilakukan yaitu pengembangan pariwisata melalui penyelenggaraan Festival Budaya, membangun TIC (Tourism Information Centre) di Bandara Soekarno Hatta, serta publikasi secara masif di media sosial untuk para wisatawan nusantara dan mancanegara, pemanfaatan space reklame dilokasi strategis untuk informasi-informasi pariwisata. Disamping itu juga melakukan inovasi terhadap program kampung tematik yang tersebar di wilayah Kota Tangerang sebagai alternatif tujuan wisata, diantaranya seperti Kampung Bekelir, Kampung Markisa, Kampung PHBS, Kampung Grenpul dan Kampung budaya lainnya.

6. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Selama tahun anggaran 2014-2016, Pemerintah Kota Tangerang menerima berbagai program/kegiatan dari anggaran tugas pembantuan Pemerintah Pusat, yaitu Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2014 dan 2015, serta pembiayaan kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu (SAK) dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017, Pemerintah Kota Tangerang tidak mendapatkan tugas pembantuan baik dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat.

7. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, selama tahun 2014-2018 Pemerintah Kota Tangerang berupaya menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.



a. **Kerjasama Antar Daerah**, didasari prinsip saling membutuhkan dan saling membantu guna mempercepat kemajuan, menselaraskan tata kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan semangat Otonomi Daerah untuk membangun kerjasama dengan daerah lain menjadi suatu keharusan. Selama Tahun 2014-2018

Pemerintah Kota Tangerang telah mengadakan kerjasama antar daerah diantaranya sebagai berikut :

Kerjasama Antar Daerah Tahun 2014 -2018

No	Kerja Sama Antar Daerah	Jenis Kegiatan	Hasil Yang Dicapai	Tahun
1	2	3	4	5
1	Provinsi DKI Jakarta	Kerjasama Pembangunan	Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang	2014
2	Provinsi DKI Jakarta	Kerjasama Pembangunan	Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang	2015
3	Provinsi Banten	Kerjasama Pembangunan	Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang	2016
4	Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan	Pelayanan Publik Kesehatan	Pelayanan Rujukan Kegawatdaruratan Maternal Dan Neonatal Lintas Batas	2016
5	Propinsi Banten	Pelayanan Kepegawaian	Penyelesaian Sk Pensiun Pns Atas Permintaan Sendiri Secara Dokumen Elektronik Bagi Pns Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang	2016
6	Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan	Pelayanan Publik Pendidikan	Pelayanan Pendidikan Lintas Batas	2016
7	Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan	Pelayanan Publik Perhubungan	Pelayanan Perhubungan Lintas Batas	2016
8	Kota Bandung, Kabupaten Lebak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Belitung Timur, Kota Makasar, Kabupaten Lombok Barat, Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Batam, Kota Malang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bangka, Kabupaten Badung, Kabupaten Sleman,	Komunikasi Dan Informatika	Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan	2016
9	Kabupaten Lombok Barat,	Komunikasi Dan Informatika	Implementasi Aplikasi Smart City	2016
10	Provinsi Banten	Kerjasama Pembangunan	Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang	2017
11	Kab Jepara, Kab Belitung Timur, Kab Bangka Selatan, Pemkot	Komunikasi Dan Informatika	Implementasi Aplikasi Smart City	2017

No	Kerja Sama Antar Daerah	Jenis Kegiatan	Hasil Yang Dicapai	Tahun
	Balikpapan, Pemkab Pinrang, Kota Bandung			
12	Kabupaten Purworejo	Komunikasi Dan Informatika	Kerjasama Jaringan Lintas Perkotaan	2017
13	Provinsi Banten	Kerjasama Pembangunan	Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan Infrastruktur Penunjang	2018

Sumber: Bagian Kerjasama dan Perekonomian Setda Kota Tangerang, Tahun 2018

- b. **Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga**, yang dijalin oleh Pemerintah Kota Tangerang selama tahun 2014-2018 yaitu dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah, diantaranya dengan Organisasi Kemasyarakatan, BJB, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, Universitas Gajah Mada, Kerjasama dengan 28 (duapuluh delapan) Rumah Sakit , BULOG, PT. Angkasa Pura II, PT. Taspen, APINDO, PT. Gajah Tunggal, UNIS, PT. Sulindafin.
- c. **Koordinasi dengan Instansi Vertikal di daerah**, pada tahun 2014-2018, Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan koordinasi dengan instansi vertikal guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan, baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan sehingga berhasilguna dan berdayaguna. Koordinasi dengan Instansi vertikal yang telah dilakukan diantaranya adalah dengan Polres Metro Tangerang, Kodim 0506 Tangerang, Komando Pos POM, Kejaksaan Negeri, PT. KAI, BNN
- d. **Pencegahan dan penanggulangan bencana**, Pemerintah Kota Tangerang telah melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana dengan dengan memberikan prioritas utama kepada peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat serta jajaran Pemerintah Daerah, melalui kegiatan penyuluhan dan kegiatan pendidikan dan pelatihan pencegahan bahaya kebakaran serta evakuasi korban bencana khususnya di daerah rawan bencana dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana. Selama kurun waktu tahun 2014-2018 di Kota Tangerang telah terjadi bencana alam banjir dan sampai dengan triwulan I tahun 2018 jumlah lokasi banjir yang telah tertangani sebanyak 31 titik/lokasi banjir. Disamping itu Pemerintah Kota Tangerang dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran selama tahun 2013-2018 telah melakukan program melalui kegiatan penyuluhan, kegiatan pendidikan dan pelatihan pencegahan bahaya kebakaran, kegiatan simulasi evakuasi korban bencana, kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran, kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam, non alam dan sosial, kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya

kebakaran, pemeliharaan sarana dan prasarana penyelamatan dan evakuasi korban, kegiatan latihan ketrampilan personil penyelamatan korban bencana dan kegiatan-kegiatan penunjang lainnya

e. Hal Lain-lain



Berkaitan dengan prestasi dan apresiasi, selama periode tahun 2013-2018 Pemerintah Kota Tangerang telah mendapatkan berbagai penghargaan atas prestasi di tingkat nasional, yaitu antara lain :

No	Jenis Penghargaan
1.	Penghargaan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Tahun 2014;
2.	Penghargaan Samkaryanugraha Parasarnya Purnakarya Nugraha, Tahun 2014;
3.	Penghargaan Adipura Kencana sebagai Kota Metropolitan Terbersih Nasional Tahun 2014,2015,2017;
4.	Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kesebelas kali berturut-turut (sejak tahun 2007) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tangerang ;
5.	Penghargaan National E-Procurement Award Kategori Kepemimpinan dan Transformasi Elektronik dari LKPP, Tahun 2015;
6.	Penghargaan Plakat Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup atas Keberhasilan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Terbaik dengan Kategori Pasar Bersih dan Terminal Bersih, Tahun 2015;
7.	Penghargaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kategori Implementasi Penilaian Kinerja dan BKD Inovatif, Tahun 2016;
8.	Penghargaan Piala Adipura Kirana dan Adiwiyata dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2016;
9.	Penghargaan National E-Procurement Award Kategori Penerapan Standar Layanan Pengadaan Secara Elektronik dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Tahun 2016;
10.	Penghargaan Swasti Saba Wistara sebagai kota Sehat Tahun 2017 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
11.	Penghargaan Smart City 2017 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk aplikasi e-Plesiran.

12.	Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kategori Lalu-Lintas, Tahun 2017
13.	Penghargaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Tahun 2017
14.	Penghargaan Kota Layak Pemuda dari kementerian Pemuda dan Olahraga, Tahun 2017
15.	Pemerintah Daerah yang Berprestasi Kinerja Terbaik yang Dinilai dari Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Tahun 2017
16.	Penghargaan Dalam Bidang Smart City Indonesia, Smart Nation Best Smart Branding Category Smart City oleh Menteri Pariwisata, Tahun 2018;
17.	Pendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Tahun 2018.
	<i>Serta masih banyak penghargaan lainnya dari tingkat nasional dan provinsi</i>

8. PENUTUP

Demikianlah Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang yang meliputi aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan, sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki sebagai Kepala Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan atas kerjasama yang baik dari semua pihak termasuk Jajaran Pemerintah serta masyarakat Kota Tangerang yang telah memberikan dukungannya dalam rangka ikut menyukseskan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Tangerang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan sebagai strategi kebijakan Pembangunan Daerah pada masa yang akan datang, sehingga tercapai visi Kota Tangerang sebagai kota yang maju, mandiri, dinamis, dan sejahtera dengan masyarakat yang berakhlakul karimah.